

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukan pada tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura belum berjalan secara maksimal. Mungkin pernyataan diatas dapat diperdebatkan, namun kenapa hal ini perlu untuk dikritisi karena tujuan pemberlakuan kebijakan Perda ini adalah untuk meminimalisir tingkat peredaran dan pengonsumsian minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Jayapura. Tentu hal ini berbanding terbalik dengan kondisi saat ini di Kabupaten Jayapura dimana penjual dengan bebas dapat memperdagangkan minuman beralkohol tanpa adanya batasan ruang dan waktu seperti yang diamanatkan oleh peraturan daerah tersebut (observasi awal).

Jika beranjak dalam perspektif ilmu kebijakan bahwa kebijakan publik melahirkan dua produk kebijakan yaitu (1) program/kegiatan (2) Aturan yang mengikat. Dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan intervensi langsung terhadap penerima manfaat kebijakan sedangkan dalam bentuk peraturan bersifat mengikat dan mengatur demi tertib dan terkendalinya suatu aktifitas-aktifitas yang berkaitan erat dengan publik. Artinya bahwa kebijakan publik dihasilkan untuk mengatur dan meminimalisir isu-isu yang berkaitan dengan publik agar berjalan sesuai dengan *policy aims*.

Secara garis besar hal ini pun tertuang dalam Undang-Undang dasar 1945 yang mengamanatkan perlindungan bagi segenap rakyat dan bangsa,

serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28G, ayat (1), dan Pasal 28H, ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa setiap upaya terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Pengedaran dan Penjualan Minuman beralkohol harus diatur secara teknis dimasing-masing wilayah administratif baik pada level Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia. Hal ini karena penjualan minuman beralkohol memberikan dampak positif dan negatif baik terhadap pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi mungkin akan dapat mendorong pendapatan ekonomi pemerintah dari sisi pajak, namun disisi yang lain dapat mendatangkan ancaman bagi masyarakat khususnya di atur dengan baik peredarannya dan dalam konteks ini kebijakan publik sangat memainkan peran strategis.

Minuman keras atau yang sering disebut miras merupakan minuman beralkohol, yaitu minuman yang mengandung etanol. Minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) merupakan dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi dan destilasi. Adapun dampak negatif dari minuman beralkohol dari segi kesehatan dapat menimbulkan gangguan fisik, gangguan jiwa, gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengakibatkan gangguan kesehatan serta jasmani dan rohani. Artinya bahwa etanol adalah salah satu bahan kimia psikoaktif yaitu bahan kimia yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran bagi orang yang mengonsumsinya.

Data menunjukan bahwa banyak dampak negatif jika Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tidak diimplementasikan secara efektif. Sebagai contoh, semakin banyak penjual minuman oplosan yang tidak diawasi penjualannya, hal ini tentu akan berdampak pada kesehatan pengonsumsi miras (Merdeka.com, 2022). Kemudian dari hasil minuman oplosan berdampak juga ke persoalan-persoalan kesehatan bahkan kematian.

Kemudian, informasi yang disebutkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura (jayapura.go.id, 2022) mengatakan bahwa mayoritas korban kekerasan seksual dan pemerkosaan diakibatkan dari konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan. Artinya bahwa dampak dari pengedaran minuman keras yang tidak diatur dengan baik akan melahirkan multi efek persoalan yang pada akhirnya akan menimbulkan isu-isu publik yang harus diintervensi oleh pemerintah. Data

yang lain yang juga didapat dari Para-para tv generasi muda jika tidak.id(2020), menyebutkan bahwa di Kabupaten Jayapura sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 tercatat 500 pemuda/i meninggal diakibatkan oleh mengkonsumsi minuman keras. Adapun mayoritas kematian adalah karena kecelakaan lalulintas. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Kapolers Kabupaten Jayapura bahwa kasus lakalantas di Kabupaten Jayapura paling banyak diakibatkan oleh pengaruh minuman keras.

Jika kita merujuk pada pandangan teoritis yang disampaikan oleh George Edward III bahwa implementasi berjalan maksimal sangat dipengaruhi oleh (1) Komunikasi, dimana keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. (2) Sumber Daya, yang adalah dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial atau bahkan peralatan dan lain-lain. Tanpa dukungan sumber daya, maka sebuah kebijakan hanya menjadi dokumen yang terpapar diatas kertas saja. (3) Disposisi yang menekankan pada Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, adanya sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai keinginan pembuat kebijakan. (4) Struktur Birokrasi yang menekankan pada SOP yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Jika merujuk pada teori Geore Edward III, beberapa data awal diatas kemudian menunjukkan bahwa sejak diimplementasikan pada tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura belum maksimal menekan laju peredaran dan penjualan minuman keras yang mungkin berdampak pada kasus-kasus yang disebutkan diatas. Dapat dikatakan bahwa dalam implmentasi peraturan daerah tersebut masih terdapat banyak kendala dan tantangan dan bisa saja beberapa factor keberhasilan implementasi kebijakan yang disebutkan oleh George Edward III, belum berjalan secara maksimal dilapangan, namun tentu akan dapat dibuktikan dalam hasil-hasil temuan penelitian.

Kemudian yang menjadi konsen juga bahwa berdasarkan observasi awal dan wawancara awal dengan beberapa masyarakat yang ada diwilayah Kanbupaten Jayapura secara umum masyarakat juga menyampaikan bahwa “peredaran minuman keras di Kabupaten Jayapura belum diawasi dengan baikdan belum terlihat tindakan tegas oleh pemerintah” jawaban ini juga didukung oleh pegamatan penulis bahwa fenomena ini masih berlangsung hingga saat ini di Kabupaten Jayapura. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan kritis, apakah selama ini Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura telah berjalan efektif?

Berdasarkan narasi latar belakang diatas dan temuan isu-isu publik pada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Minuman Beralkohol”.

B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dibuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Minuman Beralkohol?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Minuman Beralkohol?

b. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup studi dari penelitian itu sendiri. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya fokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2014 di Kabupaten Jayapura pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Minuman Beralkohol.
2. Untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Minuman Beralkohol.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu kebijakan publik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sumbangan pemikiran dan informasi kepada pengambil kebijakan terkait sejauh mana penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Minuman Beralkohol.
- b. Sebagai bahan referensi bagi pemerhati masalah kebijakan publik.

D. Tinjauan Pustaka

Selanjutnya, guna mengetahui gambaran secara jelas terhadap topic bahasan dalam penelitian ini, alangkah baiknya terlebih dulu diuraikan mengenai teori-teori dasar yang relevan atau fakta yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, proposisi, konsep maupun suatu pendekatan terbaru yang akan membantu dalam mendefenisikan variable baik secara konsep dan operasionalisasi. Tentu hal ini akan membantu karena dalam peneltian, peneliti dituntut mampu untuk memahami dengan baik teori, preposisi dan konsep dalam penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, dalam pendekatannya, penulisan akan membahas urutan teori yang didasarkan pada Grand Theory (Administrasi Publik), Middle Theory (Kebijakan Publik) dan Applied Theory (Implementasi Kebijakan).

a. Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry (2008: 8) dalam buku Deddy Mulyadi mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan public agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Disatusisi, administrasi public berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efisiensi.

Kemudian, menurut Chandler dan Plano (2008:3) dalam buku Deddy Mulyadi administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimple-mentasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dalam pandangan yang lain menurut Woodrow Wilson (2012 :21) dalam buku Wirman Syafri Administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah kerana tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat.

Oleh sebab itu maka administrasi public dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan public serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktek-praktek manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional. Peran administrasi publik dalam suatu Negara sangat vital sehingga dalam pandangan

Karl Polanyi mengatakan bahwa kondisi ekonomi suatu Negara sangat tergantung pada dinamika administrasi publik. Jika merujuk pada buku yang ditulis oleh Yermias T Keban (2019), mengemukakan bahwa administrasi publik terdiri atas enam dimensi strategis yaitu: (1) Dimensi Kebijakan (2) Dimensi Struktur Organisasi (3) Dimensi Manajemen (4) Dimensi Etika (5) Dimensi Lingkungan (6) Dimensi Akuntabilitas. Artinya bahwa berbagai isu controversial baik bersifat teoritis maupun praktis memberikan gambaran bahwa disiplin administrasi public merupakan disiplin terapan yang spesifik dan kompleks dan salah satunya adalah isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan publik.

b. Kebijakan

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Menurut Thomas R. Dye di dalam bukunya Said Zainal Abidin (2004:20) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan public mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan menurut Thomas R. Dye mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah (3) Kebijakan public adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama, bukan kehidupan orang perorangan atau golongan (4) Dikatakan sebagai

kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat langsung dari produk yang dihasilkan. James E. Anderson dalam bukunya AG Subarsono (2006:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian dan sebagainya. Lingkup kebijakan sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan. Disamping itu bila dilihat dari hirarkinya, kebijakan public dapat bersifat regional, nasional maupun local seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kabupaten/Kota dan keputusan Bupati/Walikota.

Kebijakan pemerintah juga dapat disebut sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya melebihi kewenangan pemerintah. Sementara Lasswel dan Kaplan dalam bukunya Said Zainal Abidin (2000:21) melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, mereka menyebutkan bahwa kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (*a project program as goals, values and practices*).

Hugh Heglo dalam bukunya Said Zainal Abidin menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accompolish some andend*” atau dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. **Pertama**, tujuan disini yang dimaksudkan adalah tujuan tertentu yang dikehendak iuntuk dicapai (*the desired of theends to beachieved*). Bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. **Kedua**, rencana atau proposal adalah merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya tujuan. **Ketiga**, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan dimaksud. **Keempat**, keputusan yakni tindakan yang tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. **Kelima**, dampak yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Kebijakan publik diarahkan pada proses pemecahan masalah, oleh sebab itu maka, kebijakan publik lahir karena adanya masalah. Masalah-masalah dapat dipecahkan dengan baik apabila dalam proses pembuatan kebijakan harus melibatkan semua komponen yang terlibat sebagai pembuat kebijakan dan kelompok sasaran (*targetgroup*). Kebijakan mempuyai peranan penting dalam pembangunan dan kebijakan merupakan proses dari setiap perubahan, diamana perubahan itu diarahkan ke arah yang lebih baik.

a) Kerangka Kerja Kebijakan Publik

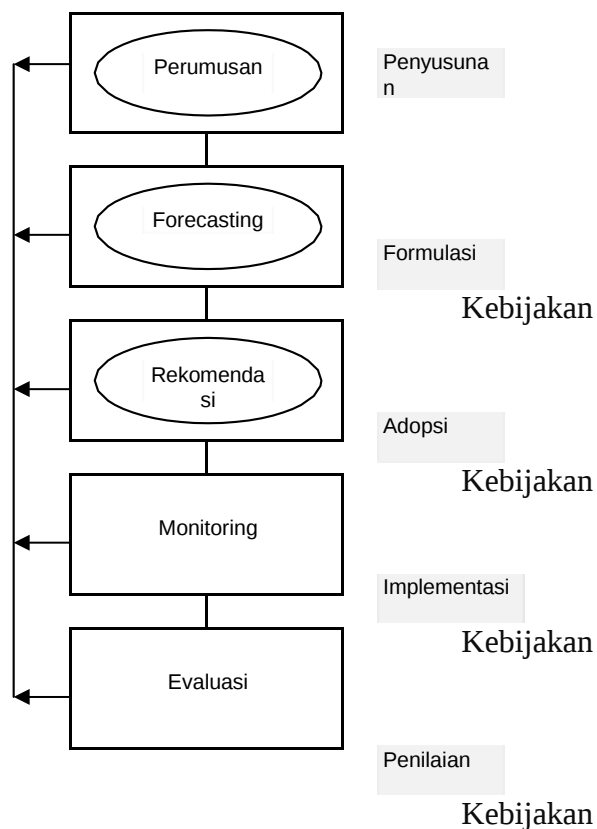
Kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh variable sebagai berikut: (1) Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup

kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya. (2) Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai. (3) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya. (4) Kemampuan actor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para actor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya. (5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat dimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan. (6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top-down approach atau bottom-up approach, otoriter atau demokratis.

b) Proses Kebijakan Publik

Proses analisa kebijakan public adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut Nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Gambar 1.1 Proses Kebijakan Publik



Sumber: WilliamN. Dun dalamAGSubarno, 2006:1

c) Tahapan Kebijakan Publik

Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni (1) membangun persepsi dikalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bias jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah (2) membuat batasan masalah dan (3) memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media masa dan sebagainya.

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan serta proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil. James Anderson dalam bukunya AG Subarsono (2006:12) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut :

1. Formulasi Masalah (*problem formulation*):
 - a. Apa masalahnya?
 - b. Apayang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan?
 - c. Bagaimana salah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi Kebijakan (*formulation*):
 - a. Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut?
 - b. Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan.
3. Penentuan Kebijakan (*adoption*):
 - a. Bagaimana alternative yang ditetapkan?
 - b. Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi?
 - c. Siapa yang melaksanakan kebijakan?
 - d. Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan?
 - e. Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan.
4. Implementasi (*implementation*):
 - a. Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan?

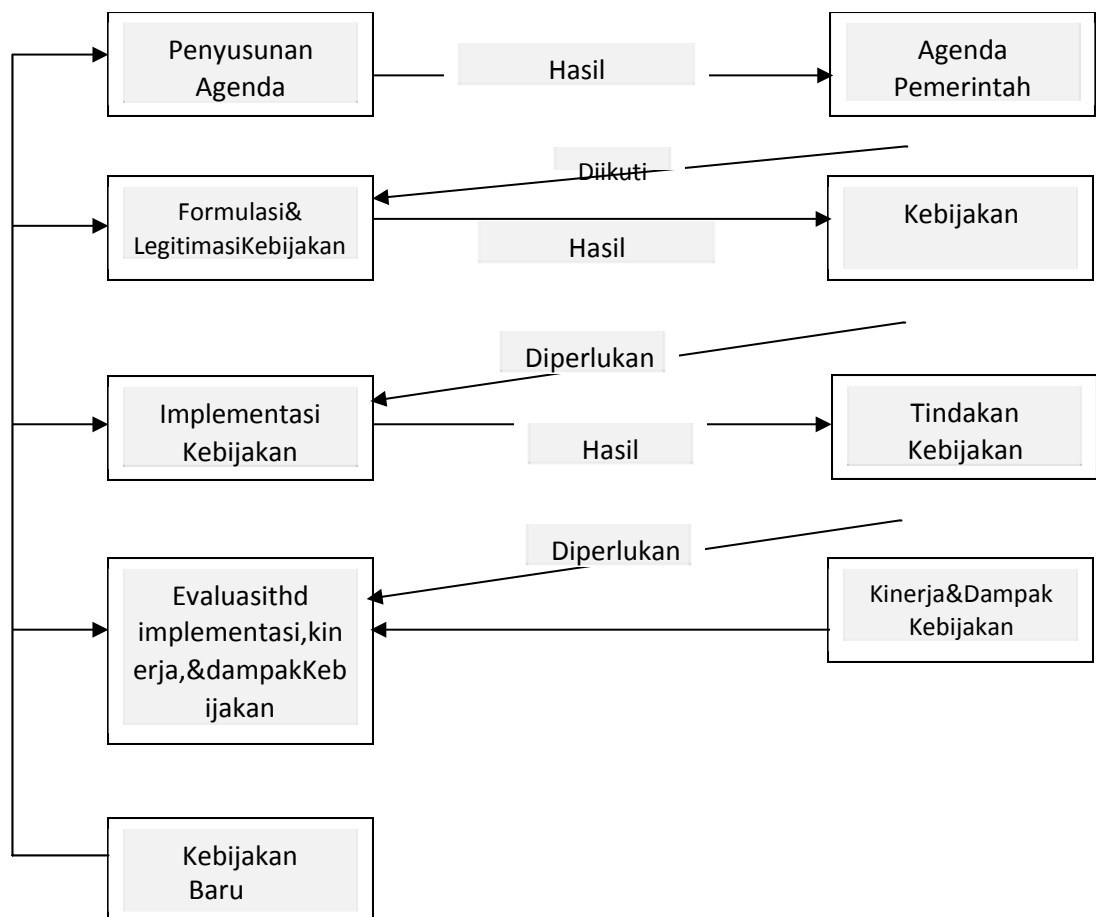
- b. Apa yang mereka kerjakan?
 - c. Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*evaluation*):
- a. Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan yang akan diukur?
 - b. Siapa yang mengevaluasi kebijakan?
 - c. Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan?
 - d. Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Sedangkan Michael Howlet dan M.Ramesh dalam bukunya AG Subarno (2006:13) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagaiberikut:

1. Penyusunan Agenda (*agendasetting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bias mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi Kebijakan (*policy evaluating*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Berdasarkan pandangan diatas kemudian penulis menyajikan gambar terkait tahapan kebijakan yang dapat dilihat sebagai berikut:

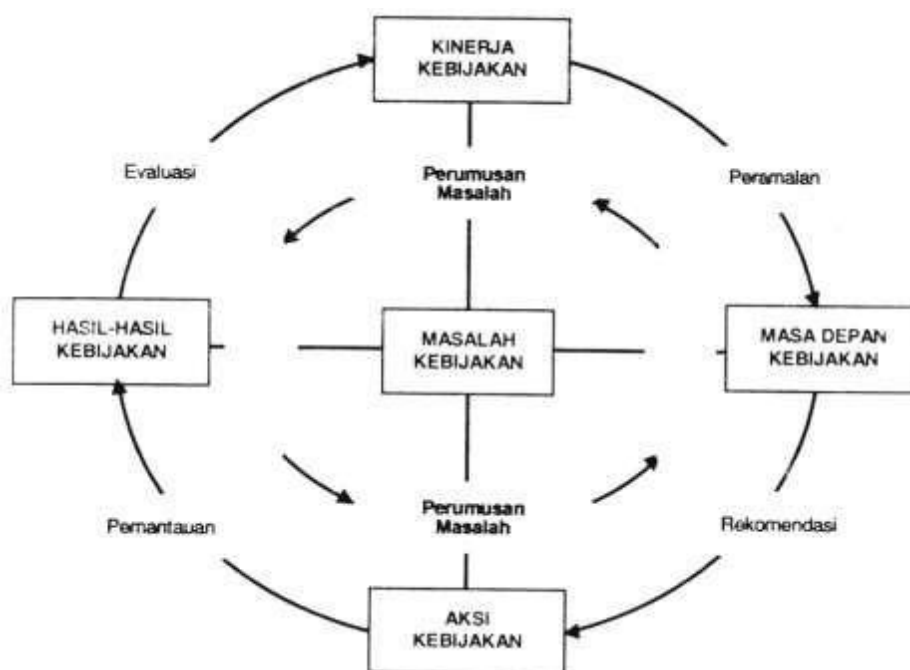
Gambar 1.2 Tahapan Kebijakan Publik



Sistem kebijakan Publik meliputi analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen - komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peralihan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Sebagai contoh: prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan dan pemantauan akan menghasilkan hasil-hasil

kebijakan, serta evaluasi akan melahirkan kinerja kebijakan. Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut, yakni merumuskan masalah kebijakan, melakukan peramalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi kebijakan.

Gambar 1.3 Analisis kebijakan



Sumber: Dun Dalam AG Subarsono, 2006:19

c. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari serangkaian proses (siklus) suatu kebijakan. Dalam hal ini implementasi dilihat sebagai: *“administration of the law in which various actors, organizations, procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals”* (Anderson, 1990: 172). Menurut Milbrey W. Mc Laughlin sebagaimana

dikutip oleh Michael Howelt dan M. Ramesh (1995:153) bahwa implementasi kebijakan publik adalah : “ *The process whereby programs or policies are caried out ; it donates the translation of plans intopractice*” Pendapat lain dari Phillip J. Cooper dan kawan-kawan (1998:185) bahwa implementasi kebijakan atau *policy implementationis the translation of a policy statement into action*. Menurut Stella Z. Theodoulou (1995:89) *Implementation can be defined as the directed change that follows a policy adoption*. Menurut Prof. George Edward III (1980) bahwa implementasi kebijakan (Policy implementation) ”*is the stage of policy making between the estabilishment of a policy-such as the pasige of a legeslative act, theissuing of an executive order, the handing down of a yudicial decision, or the promulgation of aregulatoryruie-and the concequences of the policy for the people whomit affects*”

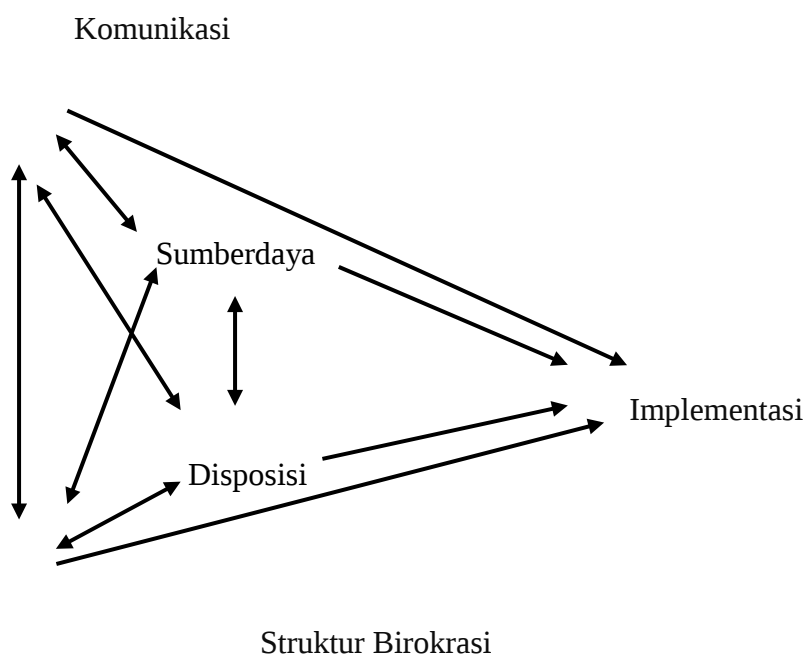
a) Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Sukses implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor, dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam bab ini akan di sajikan beberapa teori implementasi dari berbagai pakar yang menjelaskan secara rinci tentang variabel-variabel tersebut antara lain : George C. Edward III (1980), Marilee S. Grindle (1980), Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Zabatier (1983), Van Meter dan Van Horn (1975), Cheema dan Rondenelli (1983), David L.Weimer dan Aidan R.Vining (1999).

1. Model Edward III

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Keterkaitan hubungan antara variabel di atas sebagaimana tergambar dalam model implementasi berikut ini

Gambar 1.4 Model Edwards III



Sumber: Edwards III, 19:148

Variabel-variabel seperti tergambar dalam model di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Komunikasi,

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Keberhasilan program keluarga berencana (KB) di Indonesia, sebagai contoh, salah satu penyebabnya adalah karena BKKBN secara intensif melakukan sosialisasi tujuan dan manfaat program KB terhadap pasangan usia subur (PUS) melalui berbagai media.

(2) Sumber daya,

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tercapai apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni Kompetensi implementor, dan sumber daya finansial, atau bahkan peralatan dan lain-lain. Tanpa dukungan sumber daya, maka sebuah kebijakan hanya menjadi dokumen yang terpapar di atas kertas

saja.

(3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, adanya sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai keinginan pembuat kebijakan (*policy maker*). Namun sebaliknya proses implementasi kebijakan akan menjadi kurang efektif jika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Pengalaman implementasi program-program pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa rendahnya komitmen dan kejujuran aparat menimbulkan berbagai kasus korupsi yang berdampak pada bias atau tidak tercapainya tujuan-tujuan kebijakan (*policy Goals*).

(4) Struktur Birokrasi,

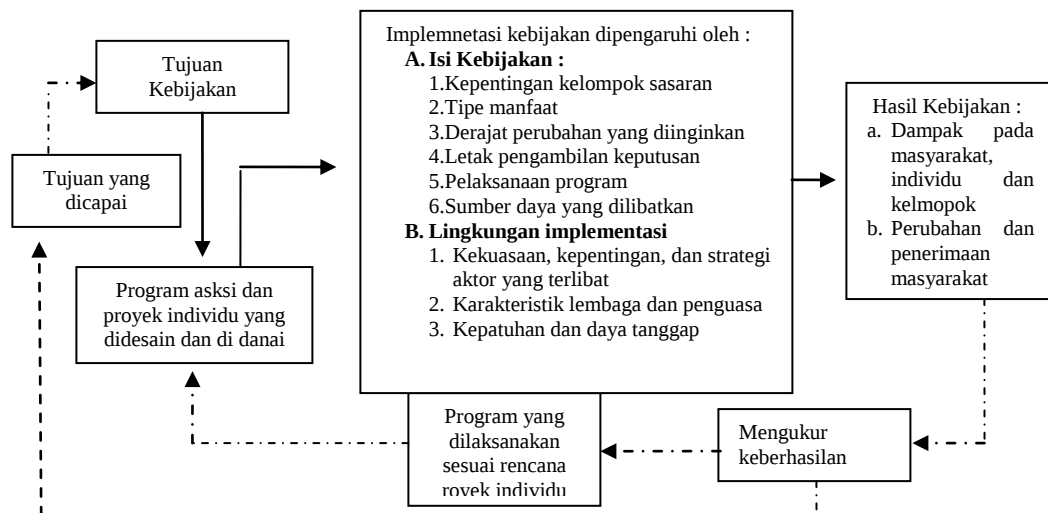
Struktur birokrasi implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi tetap (Standard Operating Procedures- SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjangakan cenderung melemahkan pengawasan dan

menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2. Model Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*). Seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. 5 Implementasi sebagai proses politik dan Administrasi dari Merilee S. Grindel



Implemnetasi kebijakan dipengaruhi oleh:

a) Isi Kebijakan:

1. Kepentingan kelompok sasaran
2. Tipe manfaat
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksanaan program

6. Sumber daya yang dilibatkan

b) Hasil Kebijakan:

1. Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok
2. Perubahan dan penerimaan program yang dilaksanakan sesuai rencana, termasuk individu Sumber: Grindle, Merilee S (1980) dalam Subarsono, 2005:94

Mengukur keberhasilan

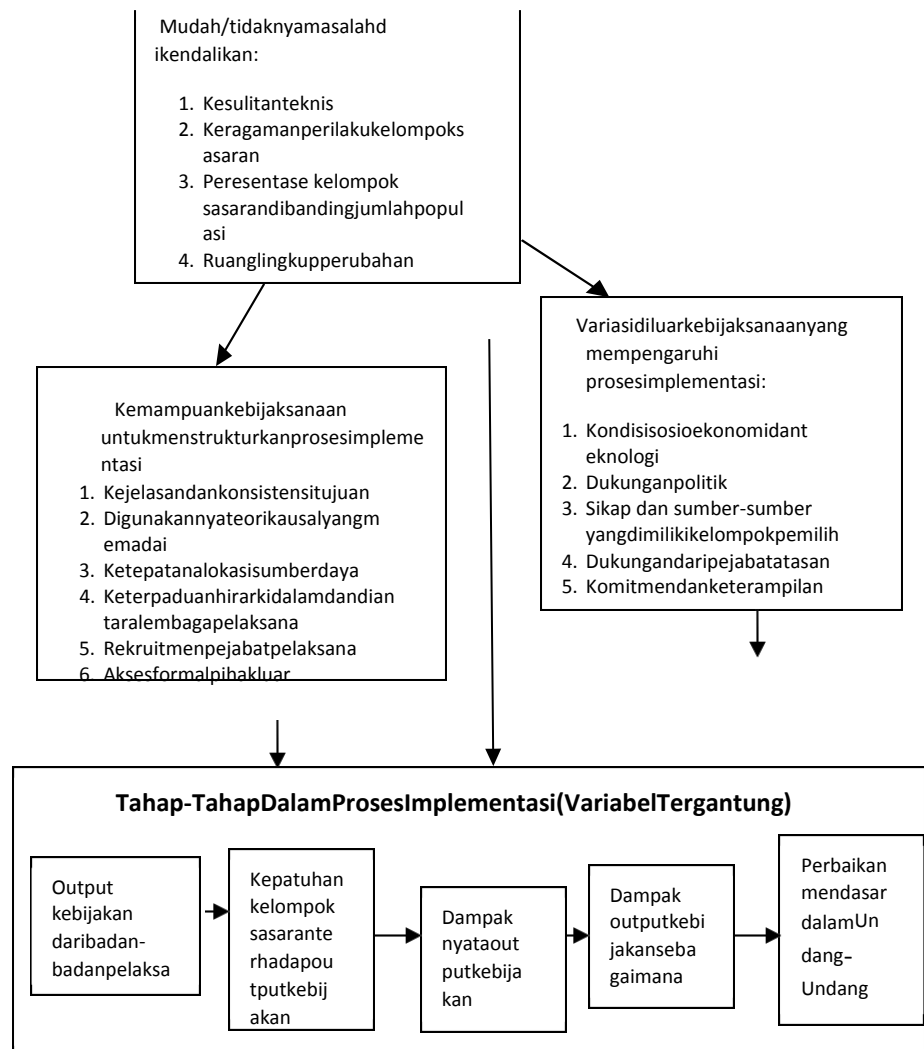
Variabel isi kebijakan mencakup: (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan ; (2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*, sebagai contoh masyarakat di wilayah *slum area* lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan dari pada menerima program kredit sepeda motor; (3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang hanya sekedar memberi bantuan misalnya kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin, (4) apakah letak sebuah program sudah tepat. Misalnya ketika BKKBN memiliki program peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memeberikan bantuan dana kepada keluarga prasejahtera, banyak orang menanyakan apakah letak program sudah tepat berada di BKKBN?; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) apakah program tersebut didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kaptauhan dan responsivitas kelompok sasaran (*target groups*).

3. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Menurut Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) Karakteristik yang dikandung oleh masalah (*tractability of the problems*); (2) Karakteristik kebijakan/Undang-Undang (*Ability of statutory structure implementation*); (3) Variabel lingkungan (*on statutory variable saffection*);. Model menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 1.6 Daniel A.Mazmanian danPaul A.Sabatier Variabel-variabel yang Mempengaruhi Proses Implementasi



Sumber: Mazmanian, Daniel Adan Sabatier, Paul A, 1983:22

Karakteristik Masalah

1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan

Ada beberapa masalah social yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau kenaikan harga beras secara tiba-tiba. Namun di

pihak lain, ada masalah-masalah social yang relatif sulit dipecahkan, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, korupsi dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah tersebut akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.

2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran

Suatu kebijakan akan cenderung relative lebih mudah diimplementasikan jika kelompok sasarannya homogen. Namun sebaliknya jika kelompok sasarannya heterogen maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman maupun persepsi kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.

3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi

Sebuah program akan lebih sulit diimplementasikan jika kelompok sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program akan relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlampau besar.

4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan

Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan dari pada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Karakteristik Kebijakan

1) Kejelasan Isi Kebijakan

Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis

Kebijakan yang memiliki dasar teoritis cukup kuat akan lebih baik diimplementasikan karena sudah teruji bila dibanding dengan kebijakan yang kurang memiliki dasar teori secara layak, walaupun pada lingkungan social tertentu perlu modifikasi.

3) Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan

Sumber daya keuangan adalah factor krusial bagi setiap program social. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya memerlukan biaya.

4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.

Kegagalan implementasi sejumlah program sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi vertical dan horizontal antar instansi

yang terlibat dalam implementasi program.

5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

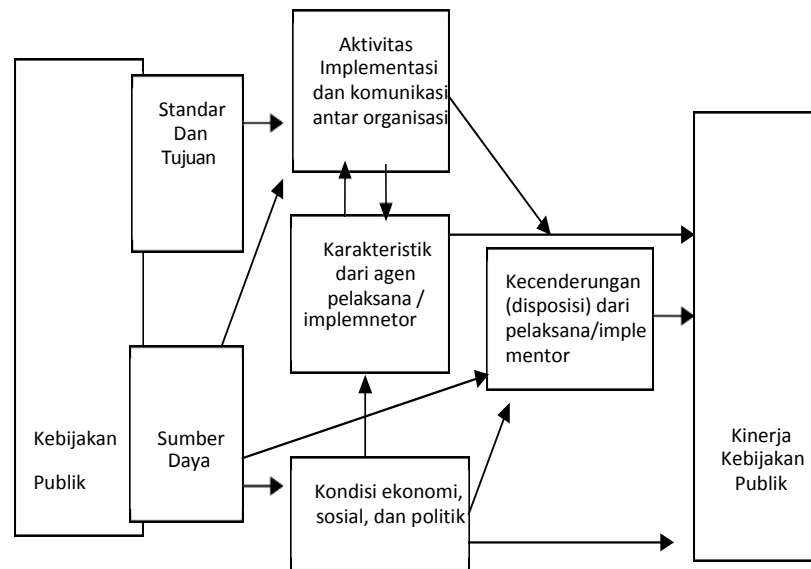
6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan

Kasus korupsi yang terjadi di Negara-negara dunia ketiga khususnya di Indonesia, salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparatur untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.

7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan dari pada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa tersaing atau teralienasi jika hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

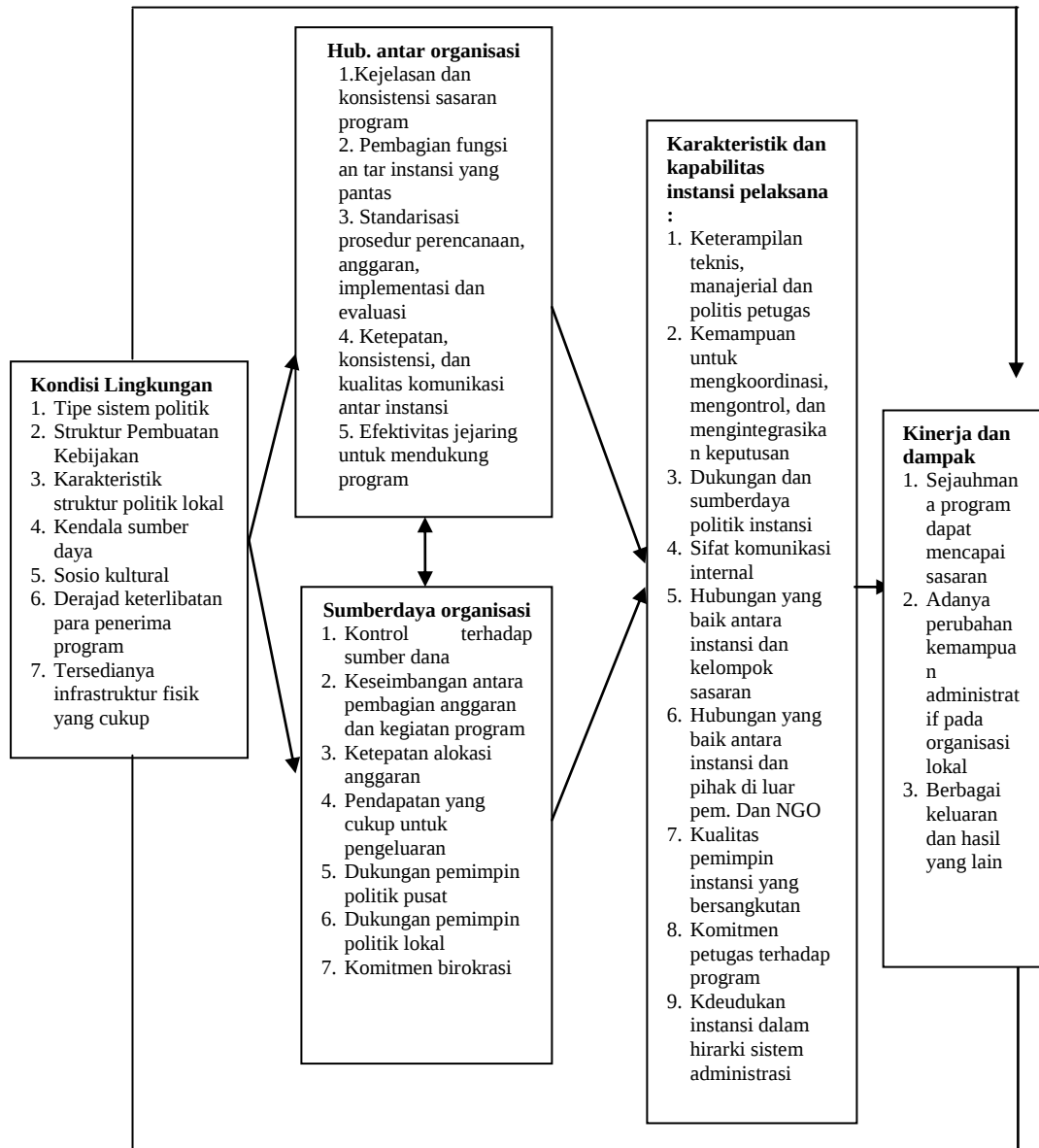
4. Model Van Meter dan VanHorn

Gambar 1.7 Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan VanHorn



Sumber: Van Meter dan Van Hpr, 1975

Gambar 1.8 Proses Implementasi Program Menurut Cheema dan



Sumber: Rondinelli dan Cheema, 1983:25

1. Hubungan yang baik antara instansi dan pihak di luar pem. Dan NGO
2. Kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan
3. Komitmen petugas terhadap program
4. Kedudukan instansi dalam hirarki system administrasi

Model Chema dan Rondeneli di atas menggambarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk analisis implementasi program-program pemerintah yang bersifat desentralistik. Ada empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni: (1) Kondisi lingkungan; (2) hubungan antar organisasi; (3) Sumber daya organisasi untuk implementasi program; (4) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

E. Definisi Variabel

Pada bagian definisi variabel akan menjelaskan 2 hal penting yaitu definisi konsep dan definisi operasional. Definisi konsep merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah penelitian. Hal ini karena sebuah penelitian dari sebuah konsep sehingga konsep menjadi penting agar dapat menjelaskan sebuah persoalan atau fenomena dengan jelas. Sedangkan definisi operasional pada hakekatnya menjelaskan variabel secara teknis dalam rangka mengoperasionalkan indikator-indikator penelitian.

a. Definisi Konsep

Implementasi dipandang sebagai proses interaksi dan aktifitas antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan.

b. Definisi Operasional

Untuk mengoperasionalkan penelitian ini kedalam indikator teknis untuk dapat diukur maka penulis menggunakan teori dari George Edward

III, (1980) dari sekian banyak model implementasi yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Komunukasi
2. SumberDaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

F. Metedologi Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dengan teknik pendekatan secara kualitatif. Tujuan penelitian tipe deskriptifa dalah mendiskripsikan secara terperinci fenomena social tertentu. Guna mendapatkan fenomena yang lebih mendalam maka digunakan metode kualitatif.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2001:3) disebutkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang selanjutnya diinterpretasikan peneliti.

Pemilihan rancangan penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksudkan agar peneliti dalam melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian akan dilakukan secara wajar. Dalam artian menggaliinformasi sesuai dengan persepsi peneliti dan informan, dan proses penggalian informasi ini dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara.

b. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

c. Jenis dan Sumber Data

1. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber data. Adapun sumber data tersebut adalah sebagai berikut : Data primer, diperoleh melalui informan, yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau kalimat pernyataan. Untuk memperoleh informasi sebagai data primer, peneliti menentukan informan yang akan di wawancarai dengan menetapkan waktu dan tempat wawancara dilakukan. Kemudian peneliti menyampaikan maksud dan tujuan diadakan wawancara dimaksud agar informan tidak keberatan dan dapat menjawab pertanyaan peneliti dengan santai dan terbuka karena hasil wawancara digunakan untuk kepentingan akademis semata tanpa harus takut dipublikasikan. Dalam wawancara peneliti menggunakan panduan yang telah ditetapkan dan mencatat/merekam proses wawancara. Wawancara bias berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan dan sesuai dengan kebutuhan peneliti, tetapi tetap dibatasi agar tidak menyimpang dari tujuan.

2. Data sekunder, diperoleh dari perpustakaan yaitu data yang didapatkan dari buku-buku literature yang digunakan sebagai pendukung utama dalam penulisan hasil penelitian ini. Data yang lain juga didapat dari arsip sebagai data dalam bentuk dokumen, foto, data statistic dan naskah-naskah yang tersedia dalam lembaga/instansi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

a. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sedangkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dibantu dengan menggunakan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan (kuesioner) , taperecorder dan buku-buku catatan untuk menjangkau informasi secara lebih lengkap dan efektif. Pedoman wawancara, dibuat untuk melakukan wawancara dan berisi sejumlah pertanyaan pokok.

Adapun tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara dengan para informan sebagaimana sumber penelitian, agar hasil yang diperoleh menjadi data dan dapat diartikan lebih mendalam. Wawancara dapat berkembang sesuai dengan jawaban para informan dan kebutuhan peneliti, tetapi masih dalam batas yang berkaitan dengan tujuan penelitian sehingga tidak sampai keluar dari tujuan penelitian.

b. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian terdiri atas informan kunci dan

informan umum yang menjadi sumber sekunder dari penelitian ini;

c. Informan Kunci:

- 1) Sekretaris Satpol PP Kabupaten Jayapura
- 2) Kabid Trantib Satpol PP Kabupaten Jayapura

d. Informan Umum

- 1) Kasat Narkoba POLRES Jayapura
- 2) Kepala BNN Kabupaten Jayapura
- 3) Masyarakat

d. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sanapiah Faisal (1990:46), dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu seperti wawancara berstruktur dan tak berstruktur, observasi partisipatif dan non partisipatif, pengukuran-pengukuran tersamar dan tidak tersamar, analisis dokumen/catatan dan sebagainya.

Ada dua aspek yang harus dipahami dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data dan pencatatan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Wawancara (*Interview*), yaitu untuk mencatat persepsi dan opini informan berkaitan dengan masalah-masalah/fenomena penelitian. Dalam memperoleh informasi dilakukan teknik wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dengan tatap muka (*face to face*) melalui pedoman wawancara yang bersifat terbuka (*open end edquestioned*). Wawancara

mendalam dilakukan karena pedoman wawancara yang digunakan belum sepenuhnya dapat merekam pandangan informan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi sebelumnya. Disamping melakukan pencatatan-pencatatan, pengumpulan data juga dilakukan dengan merekam penjelasan atau jawaban informan.

2. *Observasi*, yaitu mengamati secara langsung perilaku informan di lapangan. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci melakukan pengamatan secara seksama terhadap obyek dan fenomena yang diteliti.
3. *Inferensi*, yaitu memberikan pemaknaan terhadap data-data yang telah diberikan oleh informan.
4. Adapun dalam pencatatan data meliputi dua jenis catatan:
 - 1) Catatan yang berbentuk deskriptif yaitu berisi uraian secara rinci dan komprehensif tentang fenomena yang akan diteliti.
 - 2) Catatan Reflektif yaitu catatan yang menyangkut kesan, pendapat, tafsiran, gagasan, kecurigaan serta tanda Tanya yang muncul dalam pikiran peneliti terhadap informasi atau data yang diberikan oleh informan, untuk pencatatan data ini akan dilengkapi dengan lembar catatan data atau informasi.

e. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Melalui teknik tersebut, akan digambarkan seluruh fakta yang diperoleh dari lapangan dengan menerapkan prosedur sebagai berikut: analisis deskriptif kualitatif dengan

mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif kualitatif dengan berpedoman kepada teori-teori yang sesuai. Penelitian apapun adalah metode sistematis untuk memperoleh pengetahuan, yaitu suatu alat untuk memperoleh pengertian tentang dunia samar atau dunia gelap yang masih belum seberapa dipahami (Sanapiah, 1990:88). Untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tersebut diperlukan data/informasi. Analisis data/informasi guna mengenali bagian-bagiannya, integrasi antar bagian dalam membentuk keseluruhan fenomena. Pengetahuan atau pengertian tersebut pada kenyataannya bersandar pada relasi antar symbol yang membentuk makna tertentu.

Untuk memperoleh makna tersebut, dalam penelitian ini penelitiakan menggunakan teknik analisis Interpretasi. Teknik analisis ini untuk memunculkan apa artinya atau maknanya dari permasalahan, kasus, keadaan atau situasi yang diteliti (Boys S. Sabarguna, 2005:64). Menurut Miles dan Huberman (1992:16), secara umum analisis data kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan masing-masing adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang memanajemen, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengkoordinasi data dengan cara

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

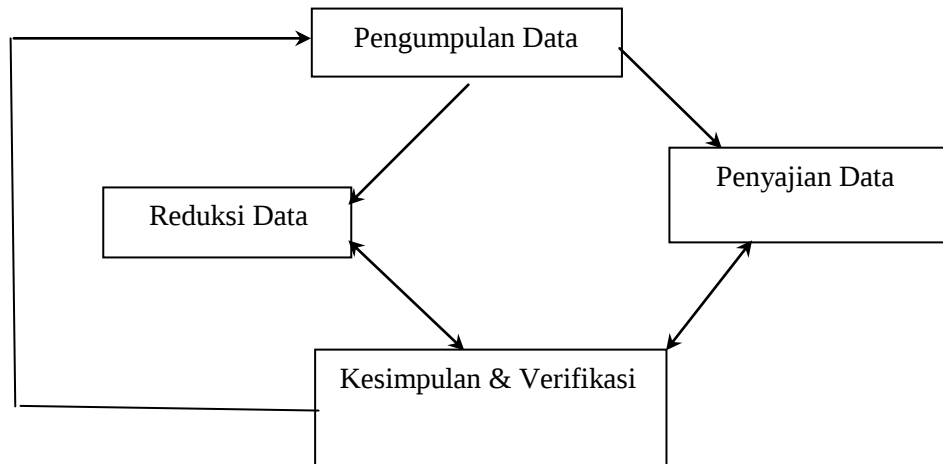
Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data dalam bentuk sekumpulan informasi yang tersusun secara lebih sistematis yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian- penyajian data kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Data dapat disajikan dalam bentuk amatrik, jaringan grafik, bagan dan sebagainya yang mempermudah peneliti memahami pola umum dari data atau informasi yang diperoleh.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Pengambilan kesimpulan pada hakekatnya adalah member pemaknaan dari data yang diperoleh. Untuk itu sejak pengumpulan data awal, peneliti berusaha memaknai data yang diperoleh dengan cara mencari pola, model, tema, hubungan persamaan, alur sebab-akibat dan hal lain yang sering muncul. Pada awalnya kesimpulan itu masih kabur tetapi semakin lama kesimpulan akan semakin jelas setelah dalam proses selanjutnya didukung oleh data yang semakin banyak. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji

kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya sehingga akan diperoleh satu keyakinan mengenai kebenarannya.

4. Modelin teraktif mengenai reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi tersebut sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Komponen dan Analisis Data (model interaktif)

Diadaptasikan dari. Milesand Huberman(1992:20).